

**ANALISIS PENYAJIAN ASET
TERKAIT ALIH KEWENANGAN SESUAI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016**

TESIS

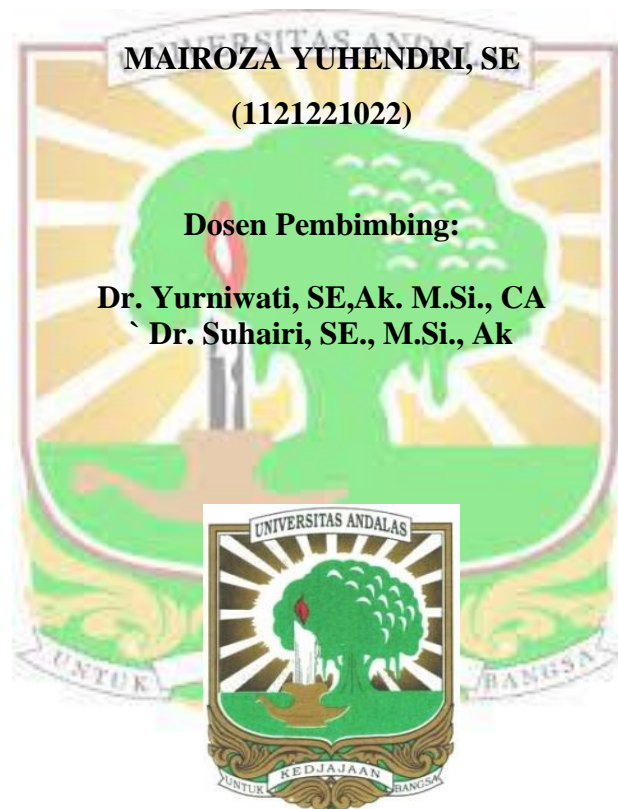


**OLEH :
MAIROZA YUHENDRI, SE
(1121221022)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

**ANALISIS PENYAJIAN ASET
TERKAIT ALIH KEWENANGAN SESUAI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

**ANALISIS PENYAJIAN ASET TERKAIT ALIH KEWENANGAN
SESUAI UU 23 TAHUN 2014 PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016**

Oleh

Mairoza Yuhendri

Magister Science (M.Si) dalam Bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas

Dibimbing Oleh : Dr.Yurniwati, SE, M.Si, Ak dan Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penyajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Laporan Keuangan tahun 2016. Proses peralihan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 melalui dokumen Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Bupati / Walikota se Sumatera Barat pada tanggal 03 Oktober 2016 menimbulkan implikasi peralihan kepemilikan aset dari pemerintah kabupaten kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan data hasil inventarisasi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kriteria yang ditetapkan merujuk pada Permendagri 19 Tahun 2016 untuk tata kelola aset dan PP 71 Tahun 2010 untuk penyajian secara akrual pada Laporan keuangan. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat sekolah yang belum dilaksanakan peralihan aset, yaitu sub urusan pendidikan khusus berupa SDLB Negeri karena keterlambatan proses inventarisasi. Data penyusutan pendukung proses peralihan aset dari kabupaten kota ke provinsi diserahkan dengan batas jangka waktu pengambilan data yang berbeda beda sehingga mempengaruhi proses pengakuan dan pencatatan aset. Penyerahan data aset per tanggal 31 Desember 2015 dari 5 kabupaten/kota telah didukung oleh data penyusutan. penyerahan data dari 2 kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi dengan penyerahan data penyusutan namun berbeda periode waktu pelaporannya. Sedangkan penyerahan data 11 kabupaten kota tidak diikuti penyerahan data penyusutannya.

Kata Kunci : Peralihan kewenangan, Peralihan aset, Urusan konkuren, Aset SMA dan SMK, CALK

**ANALYSIS OF THE PRESENTATION OF ASSETS RELATED TO THE
TRANSFER OF AUTHORITY IN ACCORDANCE WITH LAW 23 / 2014
ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE PROVINCIAL
GOVERNMENT OF WEST SUMATRA IN 2016**

By

Mairoza Yuhendri

Master of Science (M.Si) in Accounting Faculty of Economics
Andalas University

Guided By: Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak and Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of the presentation made by the Government of the Province of West Sumatra in the 2016 Financial Statements. The process of transferring authority based on UU 23/2014 through the document of the Handover of Personnel, Facilities and Infrastructure and Documents signed by the Governor of the Province of West Sumatra and Regents/Mayors throughout West Sumatra on October 3, 2016 have implications for the transfer of asset ownership from the city District Government to the West Sumatra Provincial Government. This study is a descriptive study using secondary data in the form of the West Sumatra Provincial Government Financial Statements and data from the inventory of the Regional Procurement and Management Bureau of West Sumatra Province. Data analysis was carried out qualitatively with the established criteria referring to Permendagri 19/2016 for asset management and PP 71/2010 for presentation on an accrual basis in financial statements. The results of the study indicate that there are schools that have not implemented asset transfer, namely the special education sub-agency in the form of State SDLB due to delays in the inventory process. Depreciation data supporting the process of transferring assets from districts to cities to provinces is submitted with different time limits for data collection so that it affects the process of recognizing and recording assets. The submission of asset data as of December 31, 2015 from 5 districts/cities has been supported by depreciation data. Submission of data from 2 regencies/cities to the West Sumatra Provincial Government has been completed with the submission of depreciation data but with different reporting periods. Meanwhile, the submission of data for 11 regencies and cities was not followed by the submission of depreciation data.

Keywords: Transfer of authority, Transfer of assets, Concurrent affairs, SMA and SMK assets, CALK